



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S. Sos (S1)
pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Oleh:

FARAH MITHA LISMARANI
11740124206

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN"** yang ditulis oleh :

Nama : Farah Mitha Lismarani
Nim : 11740124206
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu/ 31 Agustus 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

Nip: 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Darusman, M. Ag

NIP: 197008131997031001

Sekretaris / Penguji II

Yefni, M.Si

NIP: 197009142014112001

Penguji III

Dr. Ginda, M. Ag

NIP: 19630361991021001

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST., M.Pd

NHK: 130311014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap peneulis skripsi saudara:

Nama : Farah Mitha Lismarani

Nim : 11740124206

Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Darusman M. Ag
NIP. 197008131997031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, M.Si
NIP. 197003011999032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Senin 30 Agustus 2021

No

: Nota Dinas

Hal

: Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Farah Mitha Lismarani Nim : 11740124206** dengan judul **"Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Darusman, M.Ag

NIP. 197008131997031001

UIN SUSKA RIAU

Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FARAH MITHA LISMARANI
 NIM : 11740124206
 Tempat/Tgl. Lahir : TL. BINJAI, 13 MARET 1999
 Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Prodi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
 PROGRAM BANTUAN PANBAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN
 PANGKALAN KUBAS KABUPATEN PELALAWAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 NOVEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



FARAH MITHA LISMARANI
 NIM : 11740124206

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Farah Mitha Lismarani
Nim : 11740124206
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sangat penting dalam keberlangsungan program Pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini di latar belakangi adanya persoalan yakni kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat setempat dan belum efektifnya penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai. Maka dari itu penulis ingin meneliti persoalan lebih lanjut dengan rumusan masalah bagaimana peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan ini. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dari Pekerja Sosial Masyarakat pada Program Pemerintah yakni Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Adapun peran dari Pekerja Sosial Masyarakat tersebut sebagai pertama fasilitator yaitu melakukan pendampingan dalam proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai dan memfasilitasi antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan Pemerintah yakni Dinas Sosial, kedua PSM sebagai mediator melakukan sosialisasi pada program pemerintah yakni BPNT ketiga, PSM sebagai administrator melakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 8 (delapan) orang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah menjalankan peran nya sebagai Pekerja Sosial Masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Dan pihak Pemerintah yakni Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan merasa sangat terbantu dengan adanya Pekerja Sosial Masyarakat dalam program BPNT ini.

Kata kunci: Peran Pekerja Sosial Masyarakat dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



ABSTRACT

The Role of Community Social Workers in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Pangakalan Kuras District, Pelalawan Regency

By:

Farah mitha lismarani

Student reg: 11740124206

The existence of Community Social Workers in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is very important in the sustainability of the Government's program. Therefore, this research is based on the background of the problem, namely the lack of coordination between the community and local officials and the ineffective distribution of the Non-Cash Food Assistance Program. Therefore, the author wants to examine the problem further with the formulation of the problem of how the role of Community Social Workers in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Pangakalan Kuras District, Pelalawan Regency. The purpose of the study was to find out how the role of Community Social Workers in the Government Program, namely the Non-Cash Food Aid. The role of the Community Social Worker is as the first facilitator, namely providing assistance in the process of distributing the Non-Cash Food Assistance program and facilitating between Community Social Workers and the Government, namely the Social Service, the second PSM as a mediator conducts socialization on government programs, namely the third BPNT, PSM as administrator carries out verification and validation of Beneficiary Family data. Data were collected by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing, to measure the validity of the data, source triangulation is carried out. The results of the study indicate that Community Social Workers in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) have carried out their roles as Community Social Workers properly. And the government, namely the Social Service of Pelalawan Regency, felt very helped by the existence of Community Social Workers in this BPNT program.

Keywords: Role of Community Social Workers and Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**. Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelas Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu penulis tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam.

Syukur Alhamdulillah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran penulis sampaikan bahwa tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama untuk diri sendiri yang telah berjuang dan banyak berkorban dan kedua orangtua penulis yang teristimewa dan tercinta Ayahanda Mukhlis dan Ibunda Maryani dan keluarga yang senantiasa mendo'akan, memberikan semangat serta dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwata'ala.

Selain itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D. selaku Wakil Rektor III, yang telah memimpin, mengelola serta menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.

2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D selaku Dekan, Beserta Wakil Dekan I, Dr Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II. Dr. Toni Hartono, M.Si dan Wakil Dekan III. Dr. Azni, M.Ag. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh tanggung jawab.
3. Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
4. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Darusman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahannya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yefni, M.Si selaku Penasehat Akademik yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Pihak Dinas Sosial dan PSM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan serta Masyarakat penerima manfaat yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan penulis untuk dapat melakukan penelitian serta ilmu dan berbagai pengalaman yang telah didapatkan.

10. Kepada semua teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2017 khususnya lokal C. Terimakasih telah menjadi bagian dari suka duka selama dibangku kuliah. Terimakasih juga kepada senior dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan pengalaman dalam berbagai hal. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahuwata'ala.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah subhanahuwata'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 30 Agustus 2021

Penulis

Farah Mitha Lismarani
NIM. 11740124206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Penegasan Istilah	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	8
C. Konsep Operasional.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D. Sumber Data Penelitian	35
E. Informan Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37
A. Gambaran umum Dinas Sosial	37
B. Gambaran umum Kecamatan Pangkalan Kuras	40
C. Keadaan Demografi	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.Struktur Pemerintahan	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	55
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	62
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel IV.1 Batas Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	41
Tabel IV.2 Luas Kecamatan.....	41
Tabel IV.3 Luas Wilayah Desa/Kelurahan Pangkalan Kuras.....	43
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Pangkalan Kuras.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir.....	33
Gambar IV. 1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Absen Wawancara

Lampiran 4 : Pedoman Observasi

Lampiran 5 : Hasil Observasi

Lampiran 6 : Reduksi Data

Lampiran 7 : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah merupakan masalah yang sangat rumit dan sangat sulit untuk di hilangkan dari permasalahan sosial. Mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Masyarakat yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan.

Perkembangan masalah sosial di masyarakat berlangsung sangat cepat maka dari itu diperlukan penanganan lebih oleh Pekerja Sosial Masyarakat sebagai wujud kekuatan dalam menggerakkan kepedulian sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam meminimalisir meluasnya permasalahan sosial di masyarakat setempat.

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan profesi pemberian bantuan yang secara historis merupakan tanggapan untuk memecahkan masalah dari meluaskan masalah sosial di tengah masyarakat, individu, keluarga, dan masyarakat tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai sekarang ini, profesi ini telah memiliki kode etik tersendiri di dalam melakukan pekerjaan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pekerja sosial masyarakat (PSM) ialah masyarakat yang secara sukarela melaksanakan tugas dan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sendiri memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang sudah diatur oleh Kementerian sosial Republik Indonesia yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2019.

Dalam hal ini, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah menugaskan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam membantu penyaluran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Pangan Non Tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kecamatan Pangkalan Kuras telah menugaskan 17 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam membantu menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut.¹

Pedoman Umum BPNT 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.² Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk hanya membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-Warung yang bekerjasama dengan bank penyalur. Program ini berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat

Namun,dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara maksimal sehingga dengan adanya persoalan yakni kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat setempat sehingga masyarakat tidak mengetahui info terkait bantuan,kemudian belum efektifnya penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai karena terlihat adanya ketidaktepatan sasaran dalam perolehan bantuan tersebut. Sehingga tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini adalah sesuatu yang tidak tepat oleh karena nya penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**

¹Wawancara, 06 Desember 2020

²Adinda Syifa Dinarila Balqis,dkk *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020

B. Penegasan Istilah

1. Pengertian Peran

Menurut Harahap Peran berarti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat .

Menurut Soleman B.Taneko, Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku suatu status. Sedangkan Menurut Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.³

Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pemberdayaan sebagai bidang praktik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial suatu masyarakat di lingkungannya⁴

2. Pekerja Sosial Masyarakat

Pekerjaan sosial masyarakat adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas. mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat.⁵

Pekerja Sosial Masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi yaitu dapat meningkatkan keberdayaan Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung martabat kemanusiaan. Dan melakukan pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok- kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perhatian dari pemerintah dan pekerja sosial masyarakat.

³Ibid. Adinda Syifa Dinarila Balqis, dkk.

⁴Muh. Adam Kurniawan, 2018, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai" Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1) hlm.23

⁵Edi Suharto P.Hd *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama 2014) Hlm.23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai wujud dalam menggerakkan kepedulian sosial di masyarakat. Memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam meminimalisir meluasnya permasalahan sosial ditingkat desa lurah ataupun kecamatan.

3. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Paselong (2008) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan.⁶

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT).⁷

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada Kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Peran Pekerja

⁶Selvy Widya Rahmi Aceh, Efektivitas Pelaksanaan Program Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) Dalam Pengadaan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan, Hlm 31 thn 2019

⁷Dionita Putri Anwar, Dkk *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*, (Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 3, Tahun 2020) Hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
2. Kegunaan Institusi. Bagi pekerja sosial dan pihak dinas sosial sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi dalam proses pengambilan kebijakan mengenai penyaluran bantuan pangan non Tunai (BPNT) dan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta sebagai bahan evaluasi kinerja Pekerja Sosial dalam membantu memberdayakan ekonomi masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka fikir penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti Pelaksanaan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Mirna Tri Pertiwi** Tahun 2020 **Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam Penyaluran Bantuan Sosisal Non Tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sudimara jaya** penelitian ini bertujuan untuk : pemerintah telah memberikan program bantuan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial dalam bidang pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai kepada keluarga yang kondisi ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Sudimara jaya menjadi salah satu ujung tombak dari penyakuran bantuan pangan non tunai bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkerja Sosial Masyarakat dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sudimara sebagai penggerak, pendamping masyarakat bagi penerima manfaat dan mitra pemerintah dalam mengimplementasikan BPNT dan sebagai pemantau Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sudimara telah memaksimalkan fungsi sebagai inisiator, motivator dan administrator. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dapat dilihat dari tahun penelitian, dan sasaran objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Nurul Siti Fatonah Tahun 2015 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (Stop Babs) Di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program masih rendah dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program STBM pilar pertama (Stop BABS) di Desa Purwosari Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program STBM di Desa Purwosari masih rendah, alasannya karena kondisi lingkungan sering terjadi abrasi, dan perilaku masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dapat dilihat dari judul, tahun penelitian, dan sasaran objek penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Muh Adam Kurniawan Tahun 2017 Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Terata Yogyakarta** Penelitian ini bertujuan untuk : mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan terhadap klien yang ada pada LK3 Teratai, Mendeskripsikan bagaimana peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan dan Perlindungan klien dan mendeskripsikan factor penghambat dan pendorong Pekerja Sosial dalam menjalankan Perannya. Kesimpulannya adalah kurangnya keterbukaan antara klien dengan Pekerja Sosial sehingga masalah yang di selesaikan tidak sesuai dengan pemberdayaan yang dilakukan dan terbatasnya dana. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dapat dilihat dari tahun penelitian, dan sasaran objek penelitian.

B. Landasan Teori

1. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Harahap Peran berarti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soleman B.Taneko, Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang suatu status. Sedangkan Menurut Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat maka orang tersebut sudah menjalankan perannya⁸.

Menurut Poerwadarminta, Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak. Dari definisi dan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang berada dalam posisi terpenting dalam kehidupan masyarakat. namun dalam pelaksanaan peran seseorang bisa terbukti dengan adanya usaha untuk menggerakkan orang atau kelompok yang bersangkutan agar dapat berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan.⁹

2. Jenis Peran

Jenis peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁰

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Peran Partisipatif

⁸Ibid hlm 6

⁹Marzuki Ahmad, *Peran Dekranasda dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat melalui Home Industry Mawar Suci Anyaman Pandan di Desa Pulau Palas* (Skripsi : Uin Suska Riau Pekanbaru, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2020), hlm. 8-9

¹⁰Rusdi Abdullah, *Peran Pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Melalui Program Pemberdayaan Ummah (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) Kota Pekanbaru* Skripsi Uin Suska Riau hlm 17-20)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

4) Peran Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas.

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.

2. Pekerja Sosial Masyarakat

Menurut Zastrow dan Shulman tahun 1999 Pekerja Sosial Masyarakat adalah profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama Sejak kelahirannya sekitar tahun 1800-an pekerja sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat.

Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) adalah seseorang masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.¹¹

¹¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2012 Bab I Pasal I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja Sosial Masyarakat adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas. mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat¹². Berikut dijelaskan Visi dan Misi dari Pekerja Sosial :

a. Visi

Menjadi lembaga sertifikasi yang independen dan kredibel dalam menjamin kompetensi dan profesionalisme pekerja sosial di Indonesia

b. Misi

- 1) Mendukung pengembangan kualitas sumber daya pekerjaan sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan dan menetapkan standard kompetensi pekerjaan sosial yang akuntabel sehingga dapat meningkatkan kinerja para pekerja sosial.
- 3) Menyelenggarakan uji kompetensi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang transparan¹³

Pekerja Sosial Masyarakat dalam *setting* pengembangan masyarakat adalah bidang praktik pekerja sosial yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial suatu masyarakat terutama kelompok marjinal melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial masyarakat adalah seseorang yang bekerja dilembaga sosial tertentu baik pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki keahlian atau teknik-teknik tertentu dalam memberikan pelayanan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2012 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang

¹² *Ibid*, Edi Suharto P.Hd Hlm.23-24

¹³ <https://bppps.kemensos.go.id/tentang/visi-misi> portal bp3s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.¹⁴ Pekerja Sosial Masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan sosial memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan.

Bagi Pekerja Sosial Masyarakat, kemiskinan merupakan major problem karena sejarah lahirnya profesi pekerja sosial ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, yang pada awalnya masih dalam bentuk kegiatan charity (Ishartono, 2017). Oleh karena menurut Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2011), peran pekerja sosial masyarakat antara lain sebagai fasilitator, mediator, administrator dan lain-lain. Dari pendapat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagi Pekerja Sosial Masyarakat, kemiskinan merupakan major problem karena sejarah lahirnya profesi pekerja sosial ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, yang pada awalnya masih dalam bentuk kegiatan charity (Ishartono, 2017). Oleh karena menurut Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2011), peran pekerja sosial masyarakat antara lain sebagai fasilitator, mediator, administrator dan lain-lain. Dari pendapat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pekerja sosial masyarakat sebagai fasilitator,

Istilah “fasilitator” adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Lippit dan Rogers dalam Mardikanto menyebutnya sebagai “agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.¹⁵

¹⁴Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial

¹⁵ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*,. hlm 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun peran fasilitator yaitu memudahkan yaitu dalam mendukung dan hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka melalui proses-proses partisipasi.

Sedangkan dalam pengertian lain disebutkan fasilitator yakni memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sehubungan dengan peran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap fasilitator terkait tugasnya dalam pemberdayaan, Mardikanto menyampaikan beragam peran fasilitator, beberapa diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan atau mengarahkan paada sumber-sumber kemudahan yang diperlukan penerima manfaat.
 - 2) Peran konsultasi (bimbingan), yaitu sebagai nasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya.
 - 3) Peran *diseminasi inovasi*, yaitu peran penyebarluasan informasi/ inovasi kepada masyarakat penerima manfaatnya.
- b. Pekerja Sosial Masyarakat sebagai mediator

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai mediator memiliki tugas untuk mensosialisasikan Kegiatan salah satunya yaitu dalam Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seperti pihak-pihak yang terkait yang akan diminta berpartisipasi dan keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan serta langkah langkah selanjutnya.

Adapun Pekerja Sosial Masyarakat juga bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang permasalahan. Peran yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat adalah membantu menyelesaikan

¹⁶ *Ibid.* hlm.1 39-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan diantara dua penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Zastrow bahwa “Mediator tetap netral, tidak memihak salah satu pihak, dan memastikan mereka memahami posisi dari kedua belah pihak.

c. Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Administrator

Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Administrator melakukan pencatatan dan pelaporan. Fungsi pencatatan dan pelaporan adalah pada saat data yang turun di Basis Data Terpadu atau BDT dari kementerian sosial di verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data ini untuk mengetahui apakah nama-nama yang tercantum pada data BDT masih layak atau tidak, apakah orangnya masih ada atau sudah pindah/meninggal.

Laporan tersebut akan diteruskan kepada Instansi Dinas Sosial. Fungsi Administrator ini sangat diperlukan mengingat bahwa PSM adalah mitra pemerintah yang bertanggung jawab atas data-data mengenai masyarakat penerima manfaat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

d. Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat

Fungsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah jabatan atau sebuah pekerja yang dilakukan. Adapun menurut J S Badudu dan Sutan Mohommad Zain dalam kamus umum Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa fungsi adalah jabatan atau kedudukan invalid source specified. Berdasarkan pendapat diatas adalah menandakan suatu kedudukan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsi.

Menurut Durkheim bahwa kehidupan suatu masyarakat memiliki struktur dan bekerja sebagai system. Saling bekerja dengan memainkan fungsinya, masing-masing yang tentunya fungsi tersebut bermanfaat dan memiliki nilai guna bagi masyarakat serta diperlukan oleh struktur sosial secara keseluruhan sehingga tercipta hasil akhir yang baik dan terciptanya masyarakat yang sehat apabila kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial system dapat terpenuhi. Adapun Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya
- 2) Mencegah timbulnya masalah sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan lain sebagainya.
- 3) Mencegah (preventif) terhadap timbulnya masalah sosial dari interaksi antar anggota masyarakat, mengembangkan dan memelihara serta memperkuat sistem usaha kesejahteraan sosial, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, mengenali dan menumbuhkembangkan potensi anggota masyarakat, menjaga ketertiban sosial, dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- 4) Pekerja Sosial Masyarakat membantu dalam bertindak dinamis menggerakkan, mengarahkan, dan mengerahkan, baik perseorangan, kelompok, maupun seluruh pilar pembangunan masyarakat lingkungannya dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara berencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan

Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan terarah, berencana, konsisten, dan berkesinambungan, melembaga, serta terorganisasikan, sehinggamerupakan salah satu aspek perwujudan adanya masyarakat yang dinamis yang memungkinkan berlangsungnya swadaya sosial masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial dan pembangunan pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pekerja Sosial Masyarakat

- Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- Mengaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkannya.
- Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan berperikemanusiaan.
- Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial (Pertiwi, 2015: 17)

4. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT)

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Paselong (2008) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan.

Siagian (2007) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan (actuating) dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pelaksanaan adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di bawah rata – rata mampu mencukupi kebutuhan hidupnya bantuan ini dapat berupa uang atau barang. terkait dengan bantuan sosial ini Yusran Lupananda, (2013:117) juga mengatakan bahwa “bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang /barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT).¹⁷

Program (Bantuan Pangan Non Tunai) BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada Kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

1. Persyaratan Peserta BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Keluarga Penerima Manfaat yang diutamakan adalah Peserta Program Keluarga Harapan(PKH). Daftar Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nama pasangan kepala keluarga/ istri/pengurus
- 2) Alamat pasangan kepala keluarga/ istri/pengurus
- 3) Tanggal lahir pasangan kepala keluarga/istri/pengurus
- 4) Nomor induk kependudukan pasangan kepala keluarga/ istri/ pengurus

¹⁷Ibid,Dionita Putri Anwar,dkk Hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Nama gadis ibu kandung pasangan kepala keluarga/istri/pengurus
- 6) ID BDT pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
2. Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak lain untuk menjadi e-warong sebagai penyalur BPNT dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (duo diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur
 - 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan kegiatan lainnya. memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian keluarga penerima manfaat
 - 3) Menjual beras dan telur sesuai harga pasar
 - 4) Dapat melayani Keluarga Penerima Manfaat dan Non Keluarga Penerima Manfaat dengan menggunakan infrastruktur perbankan
 - 5) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi Keluarga Penerima Manfaat
 - 6) Lanjut Usia dan Keluarga Penerima Manfaat distabilitas.¹⁸
3. Mekanisme Pelaksanaan penyaluran BPNT antara lain :
 - 1) Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) tidak langsung datang ke eWarong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Melainkan ada petugas di desa dan pendamping yang ditugaskan dari Dinas Sosial mereka menarik KKS yang ada pada setiap Keluarga Penerima Manfaat dan mengurus proses penggesekan KKS pada e-Warong

¹⁸Aspar, Sakaruddin M, Syakhrudin Dn *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar* ,Jurnal Washiyah Volume 1 No 2,Juni 2020 Hlm 307-308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kemudian Petugas menyatukan bukti transaksi yang didapat dari e-Warong dengan Buku Rekening Kartu Keluarga Sejahtera dan kartu Kartu Keluarga Sejahtera yang sebelumnya diminta dari Keluarga Penerima Manfaat.
- 3) Setelah itu, kartu akan dibagikan dengan kertas kecil yang diberi nomor urut untuk memudahkan pada saat pengambilan manfaat yang dilaksanakan
- 4) Lalu para Keluarga Penerima Manfaat akan mengantri dan menunggu untuk dipanggil berdasarkan nomor antrian yang telah dibagikan sebelumnya. Petugas penyaluran BPNT mendapat data Keluarga Penerima Manfaat BPNT dari Dinas Sosial.¹⁹
4. Tujuan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai
 - 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM
 - 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.²⁰
 - 5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
5. Manfaat Program Manfaat BPNT
 - 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - 3) Meningkatnya transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
 - 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang usaha penjualan beras dan/atau telur.

¹⁹Adinda Syifa Dinarila Balqis,Dkk Ibid,Hlm 179

²⁰<http://Keluargaharapan.Com/Mengenal-Apa-Itu-Bantuan-Pangan-Non-Tunai-Bpnt>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Mekanisme Pelaksanaan BPNT Tahap Persiapan

- 1) Data Pagu BPNT Kabupaten/Kota beserta Daftar Keluarga Penerima Manfaat BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BPNT disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
- 3) Penyiapan e-warong (penyalur BPNT) oleh bank dilakukan dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum BPNT, antara lain memenuhi rasio 1:250 (satu agen mampu melayani sekitar 250 KPM) dan di setiap desa/kelurahan setidaknya tersedia dua e-warong. Tahap Sosialisasi dan Edukasi
- 4) Sosialisasi dan edukasi BPNT dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan BPNT serta saluran pengaduannya.
- 5) Sosialisasi dan edukasi BPNT juga diberikan kepada e-warong agar mampu melayani pemanfaatan BPNT. E-warong, sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.
- 6) Pelaksana sosialisasi dan edukasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparat daerah, serta Bank Penyalur.
- 7) Instrumen sosialisasi dan edukasi menggunakan berbagai media seperti: rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur.
- 8) Sasaran edukasi dan sosialisasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bansos Pangan, aparat desa, KPM, dan e-warong. Tahap Registrasi/Distribusi KKS

- 9) Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial
 - 10) Bank Penyalur dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekeningnya. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada KPM.
 - 11) KPM mendapatkan pemberitahuan terkait kepesertaannya dalam program BPNT dan terkait proses registrasi/distribusi KKS.
 - 12) Pada proses registrasi/distribusi KKS, calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk dilakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
 - 13) Saat registrasi, Bank Penyalur juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi e-warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan saldo KKS di e-warong.
 - 14) Dalam hal ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulisan nama, NIK atau alamat) pada saat pelaksanaan registrasi,
 - 15) maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat. Tahap Penyaluran BPNT Transfer manfaat BPNT dari Bank Penyalur ke rekening KPM BPNT dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.²¹
7. Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai Untuk mengukur efektivitas program BPNT, maka dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

²¹ Azlan Suhaini, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hlm 20-23 tahun 2019 (skripsi: Uin Suska Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tepat Sasaran dalam melakukan penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan kepada peserta KPM sesuai dengan data yang ada, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program.
- 2) Tepat Jumlah dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya dilapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
- 3) Tepat Waktu dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan dengan efektif.
- 4) Tepat Kualitas untuk mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik.
- 5) Tepat Administrasi dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi dalam penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan sering dikenal dengan istilah *empowerment*, yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuasaan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok.²²

Menurut Friedmann dalam Mardi pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah

²² Ibid, Sudirman dkk hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Menurut Sumodiningrat dalam Mardi konsep pemberdayaan Ekonomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.²³

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya demi perbaikan kehidupannya. Dalam pengertian tersebut pemberdayaan

²³Andi Nu Graha *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi* Volume 5, Nomor 2, Juni 2009 Hlm 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti : *pertama*, Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. *Kedua*, Perbaikan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. *Keempat*, Terjaminnya keamanan hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.²⁴

Adapun tujuan dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, Membantu percepatan pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat, yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan, dan usaha ekonomi produktif. *Kedua*, Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat Mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga masyarakat lokal, seperti DPD, PKK, KUD, Karang Taruna. *Ketiga*, untuk berkiprah secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat. *Keempat*, Mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ,sebagai alternative dalam mempercepat pemerataan pembangunan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga stabilitas pembangunan. *Kelima*, Mengembangkan jaringan kerja di antara lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerja sama dan keterpaduan antarprogram pemenuhan kebutuhan dasar, program pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan program peningkatan kulaitas hidup masyarakat. *Keenam*, Mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat.²⁵

6. Pemberdayaan Dalam Prespektif Islam

Pemberdayaan dalam perspektif Islam seperti pendapat M. Quraish Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyeluruh,

²⁴Ibid,Totok Mardikanto,Poerwoko Soebiato,Hlm 26 -28

²⁵Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag.*Sosiologi Pembangunan* (Bandung:CV.Pustaka Setia 2016).hlm 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materiil dan spiritual secara bersamaan. Islam merangkum materiil dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar keduanya saling menguatkan. Manusia akan menjadi pribadi yang unggul ketika kedua aspek tersebut terpenuhi.²⁶

Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, kiranya pemerintah Indonesia untuk berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut W. W. Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan manusia melalui peningkatan kapabilitas penduduk yang konsekuensinya adalah pada produktivitas dan kreativitas penduduk

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah ﷺ beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap tersebut sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah sehingga memiliki prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong menolong dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Adanya persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara satu dengan

²⁶Sudirman, dkk, Op Cit, hlm, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya. Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:²⁷

a. Prinsip keadilan

Kata keadilan di dalam al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang yang bisa mencuri hasil usahanya.

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh undangundang internasional atau regular hingga sekarang. Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal

²⁷ Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perpspektif Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, 2016) hlm.201-205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status sosial sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Pada zaman Rasulullah ﷺ masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah 'kerja' mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah.

Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (praxis). Sebagaimana Firman Allah swt yang terdapat dalam Q.S At-Taubah :105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan bekerjalah kamu, maka allah dan rasul nya serta orang-orng mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah: 105)*

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri. “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah” (HR. Bukhori dan Muslim) demikian Rasulullah mengingatkan.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai fardhu.

Rasulullah saw. juga bersabda: *“Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri.”* (HR. Bukhori, No. 2072)

e. Prinsip Tolong-Menolong (Ta’awun)

Tolong-menolong (ta’awun) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong-menolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas. “Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya” (H.R. Muslim). Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya.

Usman menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) dapat didefinisikan sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Menurut Imang Mansur Burhan dalam perspektif islam dapat didefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat islam kearah yang lebih baik melalui kehidupan sosial dan ekonomi.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teoritis, karena dalam teoritis masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur di lapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan oleh Sheafor dan Horejsi dalam Edi Suharto (2011) Peran Pekerja Sosial Masyarakat antara lain sebagai Fasilitator, Mediator, Administrator. Dari pendapat diatas dapat dijelaskan beberapa indikator Peran Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Peran Pekerja Sosial Masyarakat Sebagai Fasilitator

Melakukan pendampingan selama proses penyaluran Program BPNT, Bersifat terbuka, mendengarkan persoalan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta berusaha memberi alternatif pemecahan masalah, Mengedukasi dan membimbing KPM terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2. Peran Pekerja Sosial Masyarakat sebagai mediator

Mensosialisasikan Kegiatan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Memberikan layanan mediasi jika terjadi suatu konflik atau permasalahan terkait program BPNT yang melibatkan KPM Memberikan pemahaman menyangkut tugas dan posisi PSM dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi mitra dalam menguatkan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah yakni dinas sosial.

3. Peran Pekerja Sosial Masyarakat sebagai administrator

Melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk menentukan kebenaran data yang sebenarnya, Melakukan pencatatan dan pelaporan serta menyiapkan rekap data terkait data penerima manfaat BPNT melakukan pencatatan dan pelaporan terkait data penerima manfaat BPNT.

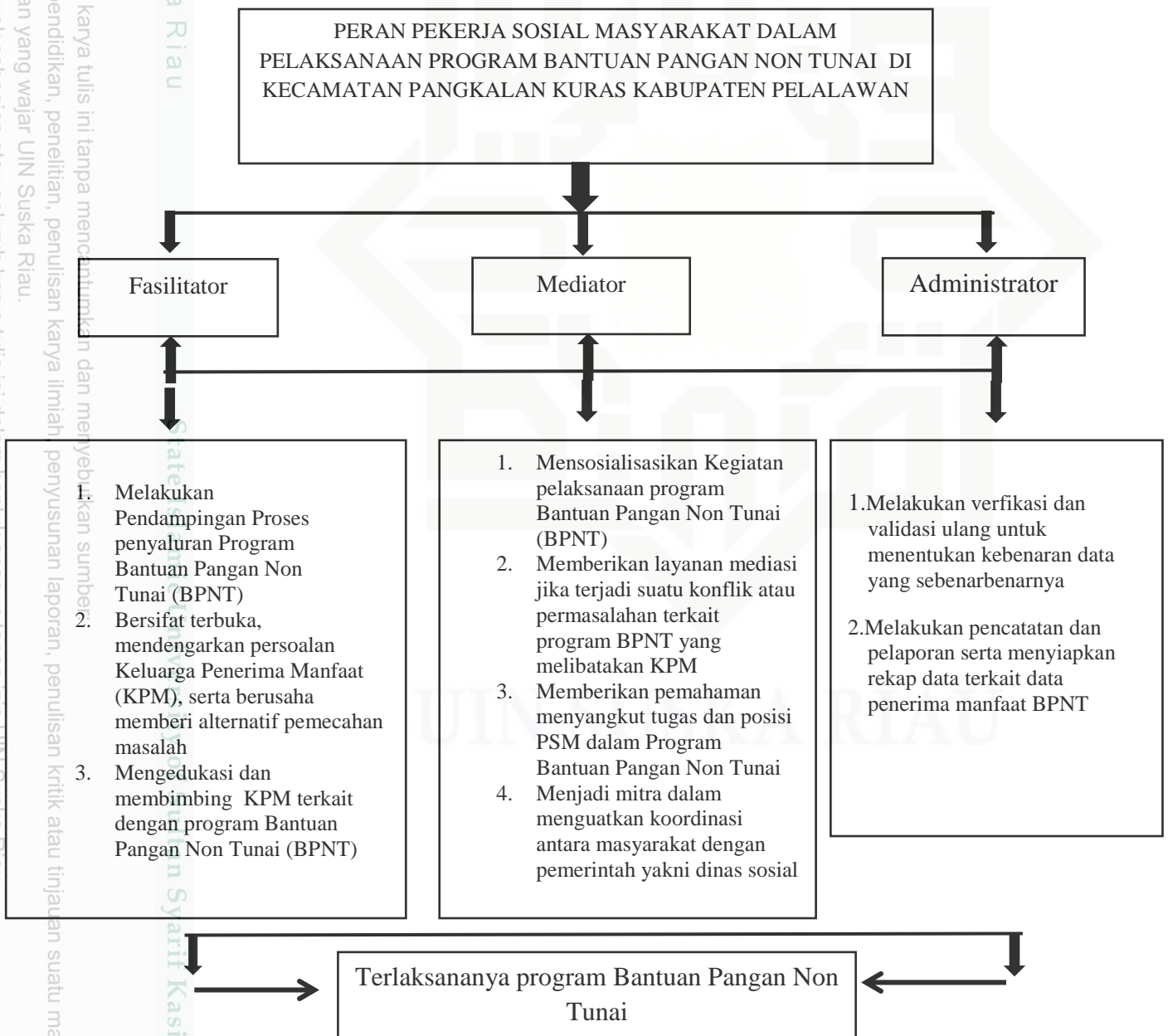
D. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.²⁸ Kerangka berfikir juga biasa diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun peran pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat yakni untuk mengembangkan dan meningkatkan

²⁸<https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/> download 30 November 2020 pukul 16.05

kondisi sosial suatu masyarakat yang dimana fungsi pekerja sosial masyarakat membantu mewujudkan kemandirian kehidupan masyarakat dan pekerja sosial masyarakat juga mengarahkan alternatif-alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada dilingkungan masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan kerangka berpikir dalam bentuk bagan-bagan seperti dibawah ini:

Gambar II.1
Kerangka Berpikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menemukan atau memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Oleh karena itu untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini diperlukan adanya metode sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

- Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pandangan pokok dari desain kualitatif mengandung beberapa hal, yaitu:
1. Realitas merupakan konstruk, multi konstruk, dan menyeluruh;
 2. Peneliti dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan karena menjalin interaksi aktif;
 3. Hipotesis kerja terikat waktu dan konteks selama penelitian;
 4. Seluruh entitas faktor-faktor teramati saling terkait, sehingga sulit dipisahkan mana dulu sebab dan akibatnya; dan e) pencarian ilmiah terikat nilai (tidak bebas nilai).

Adapun pengertian Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dengan tujuan untuk mencari data dan mencari fakta sebenarnya didalam lapangan terhadap Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini mudah di jangkau, sehingga dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang bagaimana Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta,2013), h. 3.

C. Sumber Data

Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dari dua bagian, yakni data primer dan data sekunder yang dijelaskan di bawah ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud adalah meliputi dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung terkait dengan masalah ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dari penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendudukan . informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang,yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Informan kunci berjumlah, 1 (satu) orang yaitu Kepala Bagian Penangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan
2. Informan pendukung,berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) orang Pekerja Sosial Masyarakat dan 3 (tiga) orang masyarakat Keluarga Penerima Bantuan BPNT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Jumlah
Nurmalili, S.Sos	Kepala Bagian Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	1 Orang
Masdar	Pekerja Sosial Masyarakat	1 Orang
Anisa rahmi	Pekerja Sosial Masyarakat	1 Orang
Mega wati	Pekerja Sosial Masyarakat	1 Orang
Diana	Pekerja sosial masyarakat	1 orang
Darni	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Orang
Pia	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Orang
Rita	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi , wawancara dan dokumentasi yang kemudian di jelaskan di bawah ini :

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik daerah penelitian. Untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap, lebih mendalam, dan terperinci, maka dalam melakukan pengamatan dilaksanakan melalui partisipasi aktif terutama pada saat berlangsungnya program kegiatan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Data-data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini nantinya akan dituangkan dalam suatu tulisan. Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengamati secara langsung Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

³⁰ Haris herdiansyah, *Wawancara dan Observasi dan Fokus Groups* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h, 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengamati secara langsung keadaan yang ada di lingkungan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan responden. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah disebutkan di atas..
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³¹ Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumentasi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang di teliti.³²

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.³³

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif data ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba

³¹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja posdakarya ,2004), h.

³² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posda Karya, 2000), h. 197.

³³ *Ibid*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepintas.³⁴ Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan Data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.³⁵ Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif.

³⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 222.

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 211-212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Oleh karena itu, dalam menetapkan Visi maupun misi diselaraskan dengan visi dan misi organisasi induk, dalam hal ini visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan juga perlu menselaraskan visi dan misinya dengan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau serta Visi dan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini dirasa penting karena tugas dan fungsi Dinas Sosial tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau, serta Kementerian Sosial RI. Berikut Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan yakni “Inovasi menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)” dengan MISI nya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang kuat dan Berdaya Saing Tinggi
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan terakhir kalinya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan tersebut, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci.

Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibu kota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibu kota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel IV.1
Batas Wilayah Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Batas Arah	Batas Kabupaten/Kota
1	Sebelah Utara	Kab. Siak
2	Sebelah Selatan	Kab. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
3	Sebelah Barat	Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar
4	Sebelah Timur	Kabupaten Kepulauan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan yang dideskripsikan secara luas wilayah di tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel IV.2
Luas Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Langgam	144.245,09
2	Bunut	40.802,77
3	Pangkalan Kuras	118.388,79
4	Kuala kampar	150.265,19
5	Pangkalan Kerinci	19.355,53
6	Ukui	129.956,06
7	Pelalawan	149.811,31
8	Pangkalan Lesung	50.485,12
9	Kerumutan	96.003,66
10	Teluk Meranti	423.984,41
11	Bandar Petalangan	37.255,16
12	Bandar Sekijang	31.941,2

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0-15\%$ dan $15-40\%$ Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian $\pm 3,5$ meter.³⁶

³⁶ Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kuras

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang memiliki Luas wilayah sekitar \pm 1.358 km² dengan 17 Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Pangkalan Kuras

NO	DESA/ KELURAHAN	KM2
1	Sorek Satu	80.00
2	Sorek Dua	115.00
3	Dundangan	144.00
4	Terantang Manuk	22.50
5	Palas	95.00
6	Kemang	103.50
7	Betung	50.00
8	Kesuma	510.00
9	Talau	83.00
10	Tanjung Beringin	17.00
11	Surya Indah	12.90
12	Beringin Indah	13.20
13	Sialang Indah	13.50
14	Meranti	10.40
15	Harapan Jaya	13.50
16	Batang Kulim	68.00
17	Sidomukti	6.80
Jumlah		1,358.30

2. Batas Kecamatan Pangkal Kuras

Kecamatan Pangkalan Kuras terletak di lintas yang sangat strategis karena di apit oleh 5 (lima) kecamatan yang besar potensi alamnya seperti terlihat dibawah ini :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bunut dan Kecamatan Bandar Petalangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Keadaan Demografi

Kecamatan Pangkalan Kuras juga merupakan Kecamatan nomor 2 (dua) penduduk kecamatan terbanyak setelah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, dengan jumlah penduduk sebanyak 55.556 Jiwa, yang penyebarannya dapat di lihat pada table berikut ini :³⁷

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk Pangkalan Kuras Berdasarkan Desa/Kelurahan

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDUDUK AKHIR		
			LK	PR	JLH
1	2	3	4	5	6
1	Sorek Satu	2.727	6.901	6.749	13.650
2	Sorek Dua	635	1.207	966	2.173
3	Dundangan	885	2.253	2.171	4.424
4	Trt. Manuk	729	1.173	1.089	2.262
5	Palas	377	1.042	998	2.040
6	Kemang	652	1.365	1.366	2.731
7	Betung	382	832	821	1.653
8	Kesuma	1.570	3.612	3.335	6.947
9	Talau	592	1.210	1.118	2.328
10	Tj. Beringin	341	738	712	1.450
11	Surya Indah	664	1.102	1.017	2.119
12	Beringin Indah	434	965	904	1.869
13	Sialang Indah	652	1.372	1.310	2.682
14	Meranti	372	770	660	1.431
15	Harapan Jaya	336	809	755	1.564
16	Batang Kulim	859	1.695	1.643	3.338
17	Sido Mukti	424	999	900	1.899
JUMLAH		12.601	28.047	26.513	54.560

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa Penduduk terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat pada Kelurahan Sorek Satu sebanyak 13.650 Jiwa, atau 24,49 % dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras, yang terdiri dari Penduduk laki-laki sebanyak 6.901 jiwa, atau 24,95 % dari Jumlah Penduduk Laki-laki Kecamatan Pangkalan Kuras, dan perempuan sebanyak 6.749 jiwa atau 23,97 % dari Jumlah Penduduk Perempuan Kecamatan Pangkalan Kuras.

³⁷ Sumber : data statistic Kantor Kecamatan Pangkalan Kuras,2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

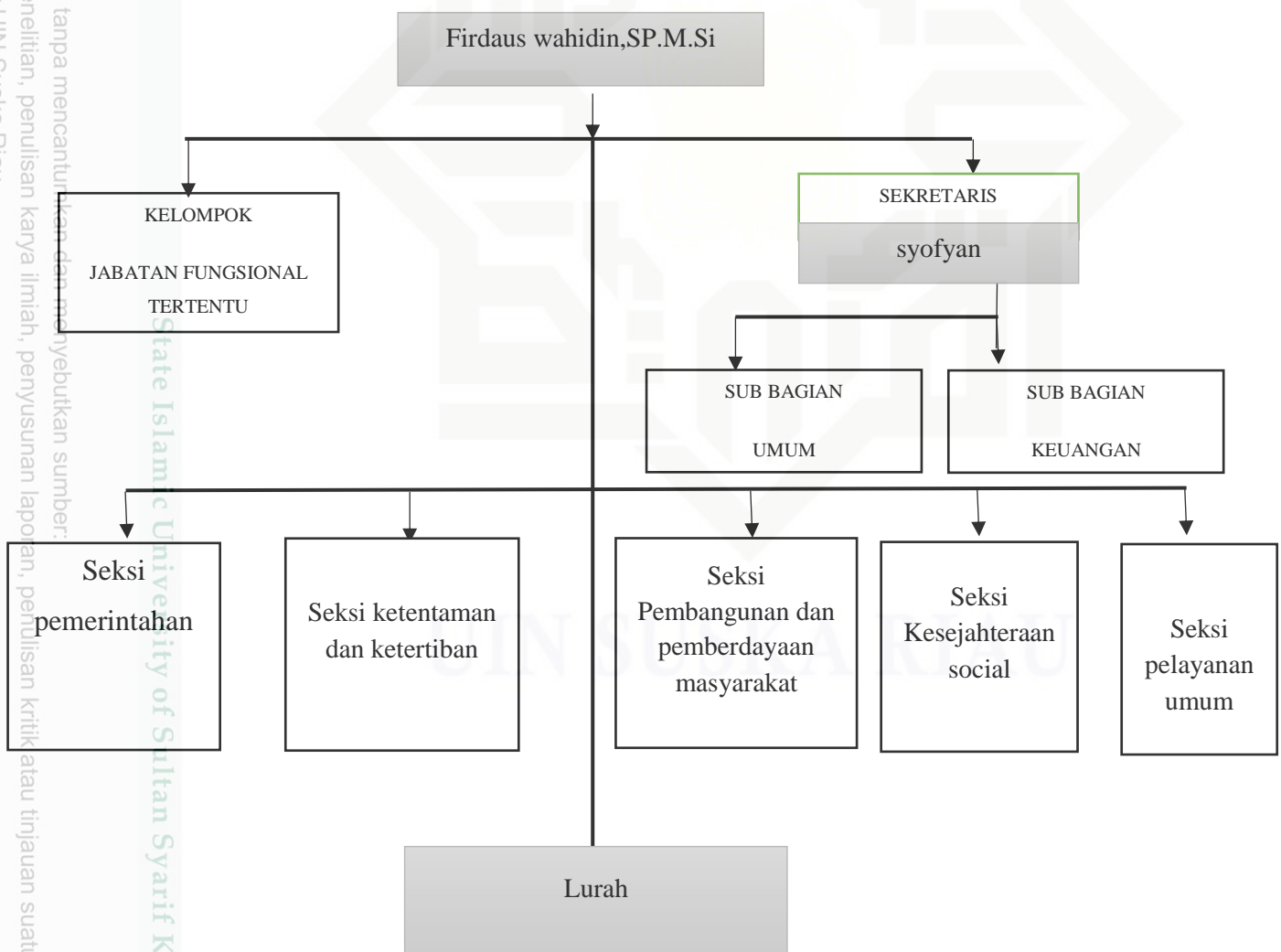
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran Penduduk yang paling sedikit terletak di Desa Meranti sebanyak 1.431 Jiwa, atau 2,57 % dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras, yang terdiri dari Penduduk laki-laki sebanyak 738 jiwa, atau 2,53 % dari Jumlah Penduduk Laki-laki Kecamatan Pangkalan Kuras, dan perempuan sebanyak 712 jiwa atau 2,60 % dari Jumlah Penduduk Perempuan Kecamatan Pangkalan Kuras.

D. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras

Struktur Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV.1
Struktur Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kuras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat sebagai berikut :

1 . Fasilitator

Pekerja Sosial Masyarakat Sebagai Fasilitator yaitu melakukan pendampingan dalam proses penyaluran program BPNT serta mengedukasi & membimbing KPM, sehingga PSM menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam memfasilitasi antara Dinas Sosial selaku Pemerintah dan KPM untuk menerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data yang telah teridentifikasi.

2. Mediator

Pekerja Sosial Masyarakat Sebagai Mediator yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan program BPNT. Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan perannya dalam memediasi KPM melalui sosialisasi yang dilakukannya setiap sebulan sekali terkait memberikan informasi penting terhadap KPM dan bertanggung jawab atas data KPM agar KPM dapat menerima manfaat dari program bantuan yang dijalankan oleh Dinas Sosial melalui PSM. Jadi PSM memainkan perannya yaitu menjadi pen jembatan atau penghubung antara KPM dan Pemerintah dalam hal memberikan informasi dan pengumpulan data untuk ditindak lanjuti dalam program BPNT

3. Administrator

Pekerja Sosial Masyarakat Sebagai Administrator yaitu melakukan verifikasi dan validasi data KPM. Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan perannya secara administratif secara jujur dan berkeadilan dan mengetahui prioritas dari program bantuan terkait siapa saja yang menjadi penerima

manfaat dari data yang telah teridentifikasi melalui beberapa hasil survey sehingga data dapat valid dan agar tidak terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan diatas, maka dapat diberi saran yang nantinya dapat lebih dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat pada program Bantuan Pangan Non Tunai:

1. Kepala Badan Penanganan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Dinas Sosial Kab. Pelalawan) agar lebih memperhatikan Pekerja Sosial Masyarakat sehingga PSM juga semangat dalam menjalankan perannya terhadap program pemerintah tersebut.
2. Kepada seluruh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) lebih selektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat dan yang tidak menerima manfaat dari program tersebut.
3. Bagi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat penulis berharap agar semua pihak memberikan masukan yang bersifat membangun agar terciptanya masyarakat yang damai, rukun dan sejahterah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perpektif Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, 201 6) hlm.201-205
- Adinda Syifa Dinarila Balqis,dkk,2020 *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1
- Adon nasrullah Jamaluddin, M.Ag,2016 *Sosiologi Pembangunan* (Bandung:CV: Pustaka setia)
- Andi Nu Graha,2009 *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi* Volume 5, Nomor 2
- Anwas,2014,*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta)
- Aspar, Sakaruddin M, Syakhrudin Dn,202, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar* ,Jurnal Washiyah Volume 1 No 2
- Azlan Suhaini, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (skripsi: Uin Suska Riau)
- Dionita Putri Anwar,Dkk 2020 *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*,(Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 3
- Edi Suharto P.Hd,2014 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama)
- [Http://Keluargaharapan.Com/Mengenal-Apa-Itu-Bantuan-Pangan-Non-Tunai-Bpnt](http://Keluargaharapan.Com/Mengenal-Apa-Itu-Bantuan-Pangan-Non-Tunai-Bpnt). Diakses Pada 30 November 2020
- <https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/> download 30 November 2020 pukul 16.05



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Marzuki Ahmad, 2020, *Peran Dekranasda dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat melalui Home Industry Mawar Suci Anyaman Pandan di Desa Pulau Palas* (Skripsi : Uin Suska Riau Pekanbaru, Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

Mirna Tri Pertiwi, *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sudirman Jaya*

Muh. Adam Kurniawan, 2018, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Teratai" Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.01 Tahun 2012 Bab I Pasal I

Rusdi Abdullah, 2020, *Peran Pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Melalui Program Pemberdayaan Ummah (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) Kota Pekanbaru* Skripsi Uin Suska Riau

Selvy Widya Rahmi Aceh, *Efektivitas Pelaksanaan Program Gisa (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) Dalam Pengadaan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara medan

Sudirman, dkk, 2017 *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo)

Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah dan Transliterasi Latin*, (Bandung : Sygma), (Surah Ar-Ra'du, Ayat 11, 2014), hal 249

Totok Mardikanto, 2015 M.S, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta)

Wawancara, 06 Desember 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Llili (Kabid Penanganan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin) pada tanggal 06 april 2021 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu anisa rahmi selaku psm pada tanggal 06 april 2021 di pangkalan kuras

Hasil wawancara dengan Ibu diana selaku psm pada tanggal 22 juni 2021 di kantor camat pangkalan kuras

Hasil wawancara dengan kak mega selaku psm pada tanggal 06 april 2021 di kantor camat pangkalan kuras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan kak Rita selaku keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tanggal 29 mei 2021

Hasil wawancara dengan ibu pia selaku keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tanggal 29 mei 2021

Hasil wawancara dengan ibu Darni selaku keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tanggal 29 mei 2021



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Kisi- Kisi Instrumen Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Alat Pengumpulan Data
Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	a. Fasilitator	1. Melakukan pendampingan selama pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) 2. Bersifat terbuka, mendengarkan persoalan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta berusaha memberi alternatif pemecahan masala 3. Mengedukasi dan membimbing KPM terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
		b. Mediator	1. Mensosialisasikan Kegiatan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Memberikan layanan mediasi jika terjadi suatu konflik atau permasalahan terkait program BPNT yang melibatkan KPM 3. Memberikan pemahaman menyangkut tugas dan posisi PSM dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai? 4. Menjadi mitra dalam	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menguatkan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah yakni dinas sosial	
	c. administrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk menentukan kebenaran data yang sebenarbenarnya 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan serta menyiapkan rekap data terkait data penerima manfaat BPNT 	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

A. Fasilitator

sub indikator pertama (mengetahui bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat):

1. Apakah psm mendampingi proses registrasi atau pembukaan rekening bagi penerima BPNT?
2. Apakah KPM ikut serta mendampingi saat proses pencairan (pemanfaatan) BPNT?
3. Apakah PSM terbuka dan mendengarkan segala keluhan yang dirasakan KPM dan berusaha menyelesaikan masalah terkait program BPNT tersebut?
4. Apakah PSM memberi edukasi dan membimbing KPM terkait informasi persiapan, penyaluran, dan pemanfaat BPNT serta bagaimana prosesnya

B. Mediator

Sub indikator kedua (mengetahui apa saja bentuk sosialisasi yang dilakukan):

1. Apakah PSM melakukan sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BPNT?
2. Bagaimana bentuk pendekatan pelaksanaan sosialisasi oleh PSM serta media sosialisasi yang digunakan?
3. Kapan dan berapa kali kegiatan sosialisasi terkait program BPNT itu berlangsung?
4. Bagaimana upaya PSM melakukan mediasi jika terjadi konflik yang dihadapi oleh KPM?
5. Apakah PSM menjelaskan tugas serta posisinya pada program BPNT kepada para KPM?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah ada upaya PSM sebagai tenaga pendamping untuk menumbuhkan hubungan saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah terkait agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan bagaimana bentuknya?

C. ADMINISTRATOR

Sub indikator ketiga (untuk mengetahui bentuk administrasi dan pelaporan)

1. Apakah PSM melakukan verifikasi dan validasi ulang setelah pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai?
2. Bagaimana cara PSM untuk mengetahui apakah penerima manfaat BPNT adalah benar-benar keluarga yang layak mendapatkan bantuan?
3. Bagaimana bentuk dan proses pelaporan pelaksanaan program BPNT oleh PSM?



Lampiran 3 : Absen Wawancara

Pewawancara : Farah Mitha Lismarani

Lokasi penelitian : Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Judul penelitian : Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Pewawancara	Informan	Lokasi wawancara	Waktu wawancara
1	Farah Mitha Lismarani	Nurmalili, S.Sos (Kepala Bagian Penanganan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan)	Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan	
2	Farah Mitha Lismarani	Masdar (Pekerja Sosial Masyarakat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	
3	Farah Mitha Lismarani	Anisa Rahmi (Pekerja Sosial Masyarakat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	
4	Farah Mitha Lismarani	Mega Wati (Pekerja Sosial Masyarakat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	
5	Farah Mitha Lismarani	Diana (Pekerja Sosial Masyarakat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	
6	Farah Mitha Lismarani	Darni (Keluarga Penerima Manfaat)	Kecamatan Pangkalan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kuras	
7	Farah Mitha Lismarani	Pia (Keluarga Penerima Manfaat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	
8	Farah Mitha Lismarani	Rita (Keluarga Penerima Manfaat)	Kecamatan Pangkalan Kuras	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : Pedoman Observasi

Pedoman Observasi

1. Mengamati secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
3. Mengamati secara langsung penerima manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



Lampiran 5 : Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Observasi merupakan langkah awal dari penelitian. Adapun observasi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu sebanyak 3 kali. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 09 September 2020. Pada observasi pertama ini, penulis melihat berbagai program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan secara langsung dan penulis tertarik dengan salah satu program yakni Bantuan Pangan Non Tunai, dan adanya masyarakat yang menjadi penerima manfaat sehingga program ini dapat membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Observasi kedua dilakukan pada akhir bulan September, menanyakan langsung kepada ibu nurmalili yakni selaku Kepala Bagian Penanganan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai ini dan bagaimana peran dari Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut.

Kemudian dilanjutkan observasi ketiga yang di mulai dari akhir bulan September 2020 pada saat itu meminta izin dari pihak pemerintah Dinas Sosial terkait melakukan penelitian di Kecamatan Pangkalan Kuras tentang program BPNT. Dan melakukan wawancara langsung bersama informan, mulai dari Kabag Penanganan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pekerja Sosial Masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Lampiran 6 : Reduksi Data

REDUKSI DATA

No	Responden	Indikator	Hasil Wawancara
1	<p>1. Nurmalili,S.Sos (kabag Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin)</p> <p>2. Masdar (Pekerja Sosial Masyarakat)</p> <p>3. Anisa rahmi(Pekerja Sosial Masyarakat)</p> <p>4. Mega wati(Pekerja Sosial Masyarakat)</p> <p>5. Diana(Pekerja Sosial Masyarakat)</p> <p>6. Darni(keluarga penerima manfaat)</p> <p>7. Pia(keluarga penerima manfaat)</p> <p>8. Rita(keluarga penerima manfaat)</p>	Fasilitator	<p>1. setiap Pekerja Sosial Masyarakat melakukan pendampingan dan juga mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat penerima manfaat melalui pendamping bantuan pangan non tunai di setiap kecamatan yang ada dikabupaten masing-masing dan Pekerja Sosial Masyarakat itu sangat berperan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini</p> <p>2. Proses pendampingan adalah proses yang sering dilakukan oleh PSM karena menjadi peran sentral penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah melakukan pendampingan Kepada Keluarga Penerima manfaat</p> <p>3. pendampingan yang dilakukan oleh PSM adalah untuk membantu atau memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat agar bisa menerima bantuan dari pemerintah.</p>
2		Mediator	<p>1. Pekerja Sosial Masyarakat melakukan Sosialisasi yang</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait program BPNT.</p> <p>2. Mengarahkan keluarga Penerima Manfaat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p>
3	Administrator	<p>1. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat</p> <p>2. Pekerja Sosial Masyarakat menjalankan perannya secara administratif secara jujur dan berkeadilan dan mengetahui prioritas dari program bantuan terkait siapa saja yang menjadi penerima manfaat dari data yang telah teridentifikasi</p>

Lampiran 7 : Dokumentasi

Hasil Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk melengkapi data-data penelitian di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.
2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Pangkalan Kuras.



Gambar 2 : kegiatan wawancara dengan kepala Bagian Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2 : kegiatan wawancara dengan pekerja sosial masyarakat di kantor camat pangkalan kuras



Gambar 3 : kegiatan wawancara dengan pekerja sosial masyarakat di kantor camat Pangkalan Kuras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4 : kegiatan wawancara dengan pekerja sosial masyarakat di kediamannya desa dundangan



Gambar 5 : kegiatan penelitian dengan masyarakat penerima manfaat di Desa Dundangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6 : kegiatan penelitian dengan masyarakat penerima manfaat di Desa sorek



Gambar 7 : kegiatan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat di Desa Sorek





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Farah Mitha Lismarani lahir di Teluk Binjai 13 Maret 1999. Lahir dari pasangan Bapak Mukhlis dan Ibu Maryani. Merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2005 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 010 Pangkalan Kerinci, pada tahun 2011 melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, pada tahun 2014 menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penulis melakukan penelitian pada bulan April hingga bulan September 2020 dengan judul “Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Pada Tanggal 31 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial melalui sidang Munaqasah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.